



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
**SUB UNIT KERJA** : FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SEGER RIYADI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM**
3. NHK : **434294**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/200 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2556 m2 di SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 177.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUCK Tahun 1975, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOPY F1CO2N28LO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
6. MOTOR, HONDA VARIO A1FO2N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 190.000.000**

**D. SURAT BERTAGIH** **Rp. ----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 4.000.000**

**F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	1.871.500.000
III. HUTANG	Rp.	317.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.554.500.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **21 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.